

PERJUANGAN *CIVIL SOCIETY* DALAM MEMPERLUAS RUANG DEMOKRASI DI ASIA

M. Khusna Amal

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember

iza_jbr@yahoo.com

Abstract

Even civil society was one requirement for the process of democratization, but it does not mean the existence of civil society automatically have a constructive impact to the democratization process. The assumption will be verifiable through qualitative analysis with descriptive analytic method. Experience of Indonesia, Philippines and South Korea showed that the changes of social-democratic politics, were determined by the role of civil society. However, the findings of this study indicate that proliferation of civil society in these countries has led to disagreement among the elements of civil society that have a negative impact for democratization. Thus, civil society can be a trouble maker for the process of democratization.

Keywords: Civil society, Non-State Organization, democracy.

Abstrak

Sekalipun civil society menjadi syarat bagi proses demokratisasi, namun bukan berarti keberadaan civil society otomatis berdampak konstruktif bagi proses demokratisasi. Asumsi ini akan diuji kebenarannya menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitik. Pengalaman Indonesia, Filipina dan Korea Selatan menunjukkan bahwa perubahan-perubahan sosial-politik demokratis, memang ditentukan oleh peran civil society. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa menjamurnya civil society di negara-negara tersebut telah memunculkan pertentangan di kalangan elemen civil society yang muaranya berdampak negatif bagi demokratisasi. Dengan demikian, civil society pun bisa menjadi *trouble maker* bagi proses-proses demokratisasi

Kata kunci: *Civil society*, organisasi non negara, demokrasi.

Pendahuluan

Pada periode 1980-an dan 1990-an, masyarakat di sejumlah negara Asia mulai terlibat aktif dalam diskursus dan sekaligus gerakan *civil society* dalam mengimbangi negara (*state*) yang kebanyakan didominasi oleh rezim oligarki. Di Filipina muncul gerakan *people power* atau revolusi EDSA yang dilakukan afiliasi buruh, petani, mahasiswa, dan gereja dalam rangka melakukan perlawanan terhadap rezim otoritarianisme Marcos (1986). Di Indonesia lahir gerakan reformasi yang digalang oleh afiliasi mahasiswa, buruh, petani, dan elit agama melawan rezim otoritarianisme Soeharto dengan Orde Baru-nya (1998).

Di Korea Selatan lahir pula gerakan oposisional yang merupakan aliansi dengan berbagai elemen *civil society* dalam perjuangannya mendelegitimasi rezim otoritarianisme (1987). Demikian pula halnya dengan fenomena *civil society* di beberapa negara Asia lainnya, seperti India, Malaysia, Singapura, Taiwan, Vietnam, Sri Lanka, Jepang dan Cina, dan sebagai perkecualian adalah Korea Utara, yang sampai sekarang fenomena *civil society* nyaris tidak mendapat ruang gerak.

Dalam perkembangannya, dinamika *civil society* di Asia menunjukkan fenomena yang unik dan sekaligus kompleks. Sebab, *civil society* yang diartikulasikan masyarakat di negara-negara Asia, tidak sama persis dengan ekspresi *civil society* di negara-negara Barat, terutama Eropa dan Amerika Latin. Tentunya, apa yang diimajinasikan oleh masyarakat Barat dengan paradigma *civil society*-nya, dapat berbeda dengan apa yang diimajinasikan oleh masyarakat di negara-negara Asia yang mengadopsi paradigma tersebut. Menurut Muthiah Alagappa, dinamika *civil society* di negara-negara Asia, memunculkan ekspresi yang beragam dari waktu ke waktu. *Civil society* di Asia menampilkan karakter yang tidak monoton, kadang sangat kritis, reaktif, radikal, dan militan dalam memposisikan diri, *vis a vis* dengan negara (*state*), namun kerap pula, ia memposisikan diri bergandengan tangan dan bermesraan dengan negara (Aspinal, 2004: 73-85).

Lebih lanjut, tulisan ini berusaha menjelajahi lanskap *civil society* yang tumbuh dan berkembang di negara-negara Asia dari jendela buku “*Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Democratic Sphere*”, yang diedit oleh Muthiah Alagappa. Sebagai sebuah bunga rampai, buku ini memuat hasil kajian beberapa pakar mengenai jejak langkah kelompok-kelompok *civil society* di Asia dalam mendorong terciptanya politik akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi. Dengan membaca buku ini, pembaca akan dapat memahami potret *civil society* di Asia dan peran yang dilakukannya dalam menciptakan perubahan politik (*political change*), tentunya dengan cita rasa Asia. Dinamika *civil society* dan perubahan sosial di Indonesia, Filipina, dan Korea dipilih menjadi subjek kajian dalam artikel ini.

***Civil Society* dan Perubahan Politik di Indonesia**

1. Era Orde Lama: Menjamurnya *Civil Society* bukan Jaminan bagi Demokrasi

Indonesia pada era Orde Lama, periode 1950-an sampai 1960-an, dicirikan oleh kehidupan asosiasional. Pada periode tersebut, aneka organisasi dan asosiasi *civil society* tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Sayangnya, kehidupan asosiasional tersebut dimobilisasi dan dipolitisasi sehingga mengakibatkan terjadinya polarisasi yang cukup tajam. Sebagaimana sering digambarkan para ahli bahwa kehidupan asosiasional masyarakat Indonesia saat itu terpolarisasi ke dalam –meminjam istilah Geertz politik *aliran* (Alagappa, 2004: 69).

Hampir tidak ada organisasi *civil society* yang tidak berafiliasi dengan partai-partai politik terutama Partai Nasionalis, Partai Islam, dan Partai Komunis yang jelas berorientasi pada perebutan kapling kekuasaan. Implikasinya, terjadi konflik luar biasa antar *civil society* dan juga antara *civil society* dengan negara. *Civil society* saat itu kerap dijadikan kendaraan, bukan untuk melahirkan keadaban (*civility*) dan modal sosial (*social capital*), melainkan sebagai daya tarik dalam konflik sosio-politik yang melibatkan massa sampai tingkat akar rumput. Karena itulah, keberadaan *civil society* pada era

Demokrasi Terpimpin ini justru banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat*. Alih-alih berperan dalam mendorong perubahan politik ke arah yang lebih demokratis, justru *civil society* berperan merontokkan pilar-pilar demokrasi (*declaine of democracy*) (Aspinal, 2004: 62-63).

Dalam catatan Aspinal, pada periode 1950-an dan 1960-an, Indonesia di bawah rezim Orde Lama, diwarnai oleh konflik antar dan intern *civil society* yang disertai kekerasan yang maha dahsyat (baca: tragedi kemanusiaan). Konflik dalam lingkungan *civil society* (Alagappa, 2004: 69) gilirannya melibatkan pula peran rezim negara, yang kemudian memendarkan konflik yang tidak saja bercorak horisontal melainkan juga vertikal.

Pertentangan antara petani miskin (*landless*) yang kebanyakan berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan tuan tanah (*landlord*) yang kebanyakan terdiri dari para kyai atau santri yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), telah menyeret keterlibatan militer yang mem-*back up* kaum santri. Dalam konflik tersebut, PKI dengan Barisan Tani Indonesia (BTI) membuat slogan “perang melawan tujuh setan desa (*seven village devils*), termasuk di dalamnya kyai”. Tak kalah serunya, para kyai atau santri meng-*counter*-nya dengan “jihad melawan ateis dan komunis” (Aspinal, 2004: 67-68).

Tercatat, konflik antar elemen *civil society* yang melibatkan peran militer telah melahirkan pembunuhan besar-besaran baik yang dilakukan kalangan komunis terhadap santri atau sebaliknya, yang dilakukan santri dengan dukungan militer terhadap kalangan komunis. Pada September sampai dengan Oktober 1965, PKI telah melancarkan kudeta dengan menculik dan membunuh enam jenderal senior, saat bersamaan militer dan NU juga melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap PKI dan simpatisannya. Tercatat sebanyak lima ratus ribu sampai satu juta orang, kebanyakan adalah anggota dan simpatisan PKI, dibunuh. Konflik yang mencapai puncaknya pada peristiwa 1965-1966 ini melahirkan perubahan politik dari Orde Lama ke Orde Baru, yang ditandai oleh naiknya rezim Soeharto (Aspinal, 2004: 71) yang dalam sepanjang

pemerintahannya kelak juga melahirkan prototipe rezim otoritarianisme jilid kedua.

2. Era Orde Baru: *Civil Society* ditekan, *Civil Society* bertahan, dan *Civil Society* melawan

Lahirnya Orde Baru dengan Soeharto tampil sebagai presiden Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari penggalan kelam sejarah pertikaian politik *aliran* yang sarat diwarnai kekerasan. Seiring naiknya Soeharto, maka gerbong militer menguasai pemerintahan dan selanjutnya memotong mata rantai politik *aliran* dan menyusun konsensus sosial dan politik dengan pendekatan kekerasan.

Kepemimpinan militer, digambarkan oleh Richard Tanter, sebagai *totalitarian ambitions*. Dalam konteks ini, militer yang menguasai negara berambisi untuk memperkuat dan memperluas kontrol negara atas kehidupan sosial. Hal ini dilakukan Orde Baru tidak lain karena khawatir memori konflik berdarah-darah sebagaimana peristiwa kemanusiaan 1965-1966 (Aspinal, 2004: 71).

Pada era Orde Baru, *civil society* dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: *pertama*, organisasi tunggal berbadan hukum, seperti organisasi petani yang tergabung dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). HKTI ini merupakan organisasi yang memiliki ketergantungan kepada pemerintah dan sekaligus memiliki afiliasi dengan Golkar. *Kedua*, organisasi semi berbadan hukum (*semicorporist*), sebuah organisasi yang independen dalam asal usul dan aspirasinya, namun berkompromi dengan negara agar bisa *survive*. Masuk dalam lingkaran organisasi ini antara lain NU dan Muhammadiyah. *Ketiga*, organisasi *civil society* proto-oposisional, yakni organisasi yang memiliki kemandirian besar dari intervensi negara, namun sesekali mengadopsi pendirian kritis terhadap kebijakan dan tindakan yang dilakukan negara. Termasuk dalam kategori ini antara lain adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam reformasi hukum (LBH), perlindungan lingkungan, dan pembangunan alternatif bagi komunitas tertentu (Aspinal, 2004: 71-72).

Sementara itu, kehidupan asosiasional selama era Orde Baru ditandai oleh dua kecenderungan penting. *Pertama*, semakin kaburnya batasan-batasan antara negara dan *civil society*. Kekaburan ini merupakan produk dari peran sentral negara dalam menciptakan restrukturisasi kehidupan sipil serta intervensi negara terhadap organisasi legal. Sebagai hasilnya, tantangan terhadap Orde Baru dicirikan dengan apa yang X.L. Ding gambarkan sebagai “*institutional amphibiousness*”, di mana institusi-institusi resmi atau semi resmi dimanfaatkan untuk tujuan melakukan *counter* terhadap tujuan yang dimiliki institusi-institusi tersebut. Contoh yang paling nyata, pada permulaan 1990-an, ada upaya dari kelompok Islam modernis yang hendak mengkolonisasi negara dari dalam melalui Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dinahkodai oleh B.J. Habibie dan juga atas sponsor dari Soeharto sendiri (Aspinal, 2004: 72-73).

Ciri *kedua* dari *civil society* era Orde Baru adalah karakternya yang dapat dibilang defensif. Tidak banyak NGO ataupun elemen *civil society* dihadapkan pada rezim Orde Baru yang sangat represif yang terang-terangan melakukan kontrol apalagi resistensi terhadap rezim negara. Sikap defensif semacam ini juga ditunjukkan secara jelas oleh NU. Sejak 1970-an, NU dikenal sebagai organisasi yang memiliki hubungan yang kerap berseberangan dengan negara yang dinilainya telah melakukan represi terhadap kehidupan umat Islam. Pada tahun 1984, organisasi ini menunjukkan perubahan dalam membangun relasi dengan pemerintah. Terlebih lagi, saat itu NU menjadi organisasi pelopor yang menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Hubungan antara NU dengan negara pun kian mencair dan menunjukkan kedekatannya. Konsekuensinya, negara pun lebih perhatian dan banyak mengalokasikan program pembangunannya ke pesantren NU (Aspinal, 2004: 73-74).

Pada akhir 1990-an, *civil society* secara institusional dapat dikatakan kian melemah. Beragam elemen *civil society* memiliki pandangan yang berbeda mengenai masyarakat yang ideal.

Sebagai konsekuensinya, kelompok-kelompok tersebut menetapkan tujuan dan langkah-langkah perjuangan yang berbeda-beda pula. Tidak sebatas itu, kelompok-kelompok *civil society* pada periode ini juga sangat tergantung dengan *founding* dari luar maupun *supporting* dari negara guna mempertahankan eksistensinya (Aspinal, 2004: 74-77).

Namun demikian, satu hal yang penting dicatat adalah bahwa represi rezim otoritarianisme Orde Baru dalam jangka panjang, tidak serta merta dapat melumpuhkan atau membuat tiarap kekuatan *civil society*. Tekanan yang besar dalam momentum tertentu telah memunculkan ledakan massa dalam melakukan perlawanan terhadap rezim negara otoriter. Gerakan reformasi 1998 yang ada di Indonesia yang berhasil menumbangkan rezim otoritarianisme Orde Baru merepresentasikan persoalan tersebut. Demikian halnya dengan kasus *people power* di Filipina yang berhasil menumbangkan rezim otoritarianisme Ferdinand Marcos. Di sini keberadaan *civil society* dipahami sebagai salah satu jangkar dan motor bagi perubahan politik di beberapa negara Asia, terutama di Indonesia, dari era otoritarianisme menuju era transisi demokrasi (Aspinal, 2004: 89).

Civil Society dan Perubahan Politik di Filipina

1. *People Power*/Revolusi EDSA 1

Pemerintahan diktator Marcos berlangsung selama 20 tahun lebih. Selama itu pula, rezim Marcos cenderung mengembangkan sistem pemerintahan hegemonik dengan karakter utamanya dominatif, represif, dan eksploitatif, tanpa banyak memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya kebebasan berpendapat dan berserikat. Di satu sisi, politik represif yang dikonstruksi Marcos, telah berhasil menciptakan kepatuhan dan ketundukan, serta mampu mengontrol dan menekan setiap gerakan perlawanan kontra pemerintah.

Di sisi lain, politik penindasan tidak selamanya mampu menciptakan kepatuhan tanpa *reserve*, sebaliknya bisa melahirkan gerakan kontra-hegemoni dari segenap elemen massa sipil. Situasi sosial-politik semacam ini pula yang diidentifikasi

banyak pihak telah menjadi konteks bagi kemunculan gerakan *people power* yang dimotori kekuatan *civil society* pada 1980-an (Franco, 2004:106-109).

Peristiwa ini bermula dari pembunuhan terhadap senator Benigno Aquino (1983). Dua juta orang mengantar jenazah ke pemakaman. Setelah itu, antara 1983-1986, Manila dilanda demonstrasi besar-besaran menentang kediktatoran Marcos yang dimotori oleh, salah satunya, Corazon Aquino. Ketika situasi kian memburuk, Marcos pada bulan November 1985 mengumumkan pemilu sela yang akan dilaksanakan pada 1986. Ia cukup percaya diri untuk memenangkan pemilu sebab ia punya segalanya (uang, kekuasaan, senjata). Pemilu pun akhirnya berhasil dilaksanakan. Namun segera muncul gelombang protes terhadap kecurangan berupa manipulasi suara yang dilakukan Marcos. Situasi kian memanas saat Wakil Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Fidel Ramos dan Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrille membelot dan menyatakan bahwa pemenang pemilu sesungguhnya adalah Corazon Aquino (Franco, 2004:106-109).

Saat itu Jaime Kardinal Sin lewat Radio Veritas meminta umatnya untuk melindungi kedua petinggi militer tersebut. Ribuan orang terdiri dari massa rakyat dari berbagai lapisan, elit politik, kelas menengah, kalangan bisnis, mahasiswa, buruh, dan elit agama (Gereja Katolik) lantas turun ke jalan memenuhi Epifano de Dos Santos Avenue (EDSA) untuk melakukan perlawanan terhadap Marcos yang diktator, korup, curang, kolusif dan nepotis. Inilah yang kemudian disebut-sebut sebagai gerakan *people power* atau revolusi EDSA yang berhasil memaksa Marcos turun dari kursi kepresidenan.

2. *People Power*/Revolusi EDSA 2

Keberhasilan *people power* 1 dalam menumbangkan rezim otoritarianisme tidak serta merta memberi garansi terhadap terbangunnya sistem kehidupan sosial-politik yang betul-betul demokratis. Terbukti, setelah gerakan *people power* Filipina yang berada pada fase transisi untuk sementara waktu memang berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis

di mana Aquino sang motor gerakan *people power* terpilih sebagai pemenangnya. Pada masa pemerintahan Aquino ini pula sesungguhnya elemen-elemen *civil society* dalam mengawal pemerintahan yang demokratis telah terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok. Mereka tidak memiliki pandangan dan kepentingan sama terkait dengan pembangunan demokrasi. Ini pula yang kemudian juga memicu perbedaan dan konflik kepentingan di antara elemen *civil society* (Jennifer C. Franco, 2004:109-111).

Kondisi sosial-politik Filipina terus mengalami kemerosotan seiring dengan kemenangan Estrada dalam pemilu. Di era pemerintahan Estrada ini, sistem perpolitikan di Filipina dapat dikatakan mengalami kemunduran, yakni kembali ke jalur otoritarianisme. Sistem perpolitikan yang tidak aspiratif terhadap kepentingan rakyat ini memicu masyarakat Filipina melakukan protes.

Aksi protes yang terus meluas pada gilirannya mampu melahirkan kembali gerakan *people power* jilid 2 yang juga dimotori elemen *civil society*. Gerakan *people power* jilid 2 sebagaimana *people power* jilid berhasil menumbangkan rezim Estrada dan melahirkan pimpinan baru Gloria Macapagal Arroyo lewat pemilu (Franco, 2004:109-111).

Dalam perkembangan berikutnya dinamika *civil society* dalam membangun *power relation* dengan negara ataupun dalam agenda perubahan politik, hampir sama dengan Indonesia, mengalami pasang surut. Arroyo yang sempat menjadi representasi gerakan *people power* 2, di awal-awal pemerintahannya masih dinilai cukup demokratis. Namun, dalam periode berikutnya, pemerintahan Arroyo menampilkan wataknya yang kurang demokratis. Isu korupsi, kolusi dan nepotisme kembali merebak mewarnai pemerintahan Arroyo. Ini pula yang memunculkan gerakan *people power* jilid 3. Namun, masyarakat Filipina tampaknya mulai jenuh dengan gerakan *people power*. Mereka mempertanyakan, akankah perubahan politik di Filipina selalu dilakukan dengan cara-cara gerakan *people power*?

***Civil Society* dan perubahan politik di Korea Selatan**

1. Jejak Historis Gerakan *Civil Society*

Jejak-jejak sejarah gerakan oposisional *civil society* di Korea Selatan dapat dilacak pada periode kolonialisme Jepang yang berlangsung mulai 1910 sampai 1945. Salah satu konsekuensi dari kolonialisme Jepang adalah munculnya formasi dan konsolidasi dari suatu model konflik antara negara dan *civil society*. Imperialisme Jepang telah mendorong terbentuknya negara kolonial yang super kuat dalam berhadapan dengan masyarakat Korea. Pemerintah kolonial Korea memiliki kekuasaan tak terbatas mengatasi legislatif, yudikatif, administratif, militer, serta lebih kuat dan lebih bagus organisasinya dibandingkan dengan sistem pemerintahan asli Korea pra-kolonial, yakni sistem monarki. Saat bersamaan, imperialisme Jepang terkenal sangat resistan, militan dan oposisional terhadap *civil society* (Kim, 2004: 140).

Saat Jepang mengalami kemunduran pada Agustus 1945, negara kolonial Jepang di Korea tidak serta merta berhenti. Otoritas Jepang memberikan kepada Yo Un Hyong, untuk selanjutnya Yo segera membentuk panitia persiapan penetapan Negara Baru (*the Preparatory Committee for Establishing a New State*), selanjutnya disebut Konjun, guna memposisikan kembali aparatur negara Jepang.

Dalam dua minggu, panitia persiapan berhasil menetapkan 145 perkantoran lokal. Pada 8 September 1945, Republik Rakyat Korea dirayakan. Dalam membentuk aneka organisasi guna menempatkan kembali struktur negara kolonial, panitia persiapan menetapkan sebuah negara baru yang mengakomodasi perluasan eksplosif *civil society* saat itu. Selang beberapa periode kolonialisme Jepang, para pekerja dan petani membentuk organisasi sosial. Lebih lanjut, sejumlah kelompok sosial merepresentasikan mahasiswa, pemuda, perempuan, aktivis budaya, dan elemen agama juga terbentuk (Kim, 2004: 140).

Penting dicatat bahwa komunis memainkan peran instrumental dalam organisasi sosial. Orang-orang komunis Korea, di

antara mereka banyak yang tampil sebagai pimpinan sejumlah gerakan perjuangan bawah tanah melawan imperialisme Jepang selama periode kolonial, membentuk Partai Komunis Korea (Choson Kongsandang) pada 11 September 1945. Partai ini memainkan peran penting dalam mengorganisasi *the National Council of Labor Unions* (Chonp'yong) dan *the National Federation of Peasant Unions* (Chonnong) pada akhir 1945.

Peran yang tak kalah pentingnya yang dilakukan Partai Komunis Korea antara lain adalah inisiatif untuk mengorganisasikan *the Korean Democratic Youth Federation* (Minch'ong), *the National Women's Union* (Puch'ong), *the Communist Youth Federation* (Kongch'ong), *the Writers' Alliance* (Munhakka Tongmaeng), dan *the Scientists' Alliance* (Kwahakcha Tongmaeng). Pada 15 Pebruari 1946, sejumlah organisasi sosial yang berbeda-beda telah mengalami perkembangan mencapai jumlah 35 organisasi. Kelompok-kelompok *civil society* ini tidak serta merta berada di bawah pengaruh dan kontrol komunis. Selama periode ini, kelompok *civil society* justru dicirikan dengan tingginya tingkatan fungsi dan otonomi mereka (Kim, 2004: 141).

Munculnya pemerintahan militer di bawah angkatan bersenjata Amerika di Korea membawa bencana tersendiri bagi perkembangan organisasi *civil society*. Pemerintahan militer banyak mengambil kebijakan yang merugikan bagi kelompok *civil society*. Di antaranya, pemerintah telah mengakhiri dominasi organisasi-organisasi sosial yang tumbuh dari bawah dan secara dramatis merubah lanskap politik Korea. Untuk memutus kedekatan hubungan antara *civil society* dengan komunis, pemerintah militer Amerika secara sistematis merepresi dan mendepolitisasi *civil society*. Dihadapkan pada situasi demikian, kelompok *civil society* yang dipelopori oleh *the National Council of Labour Unions* dan *the National Federation of Peasant Unions*, merespon kebijakan opresif pemerintahan militer Amerika dengan demonstrasi dan perlawanan keras. Tidak kalah garangnya, pemerintahan militer Amerika pun

merespon gerakan tersebut secara represif dengan pendekatan dan kebijakan Perang Dingin (Kim, 2004: 142).

Dalam perkembangan berikutnya (pertengahan 1980), Korea Selatan jatuh kembali ke dalam sistem pemerintahan yang tidak demokratis. Konstitusi diamandemen untuk mengeliminasi pembatasan kekuasaan presiden. Eksekutif menempati posisi yang begitu dominan atas legislatif dan yudikatif, pemilu tidak lagi berjalan bebas dan jujur, kelompok-kelompok kepentingan hanya menjadi tangan panjang, dan keberadaan media massa dimonitor dan dikontrol ketat oleh negara. Pada pertengahan 1980-an pula, elemen-elemen demokrasi liberal kembali mengasumsikan makna baru dan riil.

Seorang pimpinan partai berkuasa, Roh Tae Woo, mengajukan delapan paket demokratisasi yang banyak mengadopsi tuntutan partai oposisi dan kelompok-kelompok gerakan sosial. Sebagai hasilnya, sejumlah perubahan signifikan muncul dalam politik Korea sejak 1987. Dampak lebih lanjut, kebebasan sipil secara signifikan kembali meluas, kontestasi pemilu pun berlangsung secara jujur, dan kontrol sipil atas militer kian menguat. Seirama dengan perluasan kebebasan dan kekuatan sipil, Korea Selatan pun kian berhasil melewati transisi dari kebijakan otoritarian menuju demokrasi, dan bahkan menjadi salah satu negara Asia yang mampu mengonsolidasikan demokrasi.

2. *Civil Society*, Transisi, dan Konsolidasi Demokrasi

Dinamika perpolitikan di Korea Selatan dapat dibagi ke dalam tiga periodisasi yaitu, periode di mana sebuah rezim otoritarian kolaps, periode transisi demokrasi muncul, dan periode kooptasi militer Amerika. Periodisasi tersebut berlangsung sejak 1956-1961; 1973-1980; dan 1984-1987. Dalam tiga periode tersebut, kelompok-kelompok *civil society* dinilai memiliki kontribusi besar terhadap pendobrakan otoritarian dan melahirkan era transisi demokrasi.

Pada periode demokratisasi pertama (1956-1961), mahasiswa dan intelektual urban melakukan perlawanan terhadap

represi dan korupsi yang dilakukan rezim otoritarian Syngman Rhee. Mahasiswa bersama partai oposisi progresif juga melakukan kampanye demokrasi. Periode demokrasi kedua (1973-1980), sejumlah asosiasi nasional terdiri dari kalangan intelektual, jurnalis, profesional dan pemimpin agama memainkan peran penting dalam melawan rezim otoriter Park Chung Hee. Sedangkan pada periode ketiga demokrasi, aliansi *civil society* pro-demokrasi terdiri dari mahasiswa, pekerja, dan gereja serta mendapatkan sokongan dari kelas menengah.

Kelompok-kelompok *civil society* disatukan oleh asosiasi nasional yang mencakup sejumlah organisasi regional dan nasional. Keberadaan *civil society* kian kuat, memiliki cakupan yang semakin luas, usaha-usaha yang lebih sistematis dalam melakukan perlawanan terhadap rezim otoritarian dan sekaligus menegosiasikan tuntutan demokrasi yang mereka perjuangkan (Kim, 2004: 140).

Represi negara terhadap *civil society* di bawah rezim Chun Doo Hwan berlangsung selama empat tahun (1980-1983). Bersamaan dengan *coup* militer dan kekerasan terhadap gerakan pro-demokrasi di Kwangju pada Mei 1980, rezim otoritarian melakukan pembersihan terhadap elemen masyarakat dengan melakukan penangkapan terhadap ribuan pejabat publik, politisi, profesor, guru, pastor, jurnalis dan mahasiswa atas dasar tuduhan korupsi, anjuran demonstrasi anti pemerintah, dan usaha pemberontakan (Kim, 2004: 143-144).

Akhir 1983, penindasan Chun terhadap *civil society* berkurang signifikan. Rezim otoritarian memutuskan untuk meliberalisasi kebijakan dengan memberikan kesempatan kepada para profesor dan mahasiswa untuk kembali ke kampus, menarik polisi militer dari kampus, dan merehabilitasi para tahanan politik. Kebijakan baru pemerintahan Chun ini membawa implikasi terhadap bangkitnya kembali *civil society*. Pada periode itu pula, para politisi oposisi membentuk *the New Korea Democratic Party* (NKDP: Sinhan Minjung) pada Januari 1985. Politik otoritarian telah jatuh dan transisi demokrasi pun mulai bersemi, terutama, ditandai oleh munculnya formasi

NKDP beserta penajaran pemilihnya dengan kelompok-kelompok *civil society* (Kim, 2004: 145).

Sementara itu, gerakan pro-demokrasi di Korea Selatan yang berlangsung selama 1986-1987 mengambil tiga bentuk berbeda. *Pertama*, dimulai pada permulaan 1986, para aktivis agama mengisukan serangkaian deklarasi cercaan terhadap rezim otoritarian dan menuntut revisi perundang-undangan secara cepat. Para Pastor Protestan membuat pernyataan pada Maret 1986 yang intinya diperlukan *drafting* terhadap konstitusi yang menjamin pemilihan presiden, hak-hak asasi manusia yang paling dasar, dan keadilan ekonomi. Cardinal Kim Su Hwan pada permulaan Mei 1986 juga mengumumkan bahwa demokratisasi adalah jalan terbaik untuk membuat perdamaian bersama Tuhan.

Kedua, kelompok oposisi NKPD me-*launching* kampanye populer untuk mengumpulkan sepuluh juta tanda tangan guna mendukung diadakannya revisi undang-undang. *Ketiga*, kelompok-kelompok *civil society* bergabung dengan NKDP mensponsori sejumlah rapat umum massa dalam mendorong demokratisasi. Koalisi demokrasi besar yang digalang kelompok *civil society* dan partai oposisi sukses memobilisasi warga masyarakat Korea dari seluruh lapisan kehidupan -mahasiswa, pekerja, petani, pemimpin agama, dan warga negara lainnya- di balik slogan “turunkan rezim otoritarian militer dan bangkitlah pemerintahan demokratik” (Kim, 2004: 146).

Akhirnya, pada 29 Juni 1987, mobilisasi massa secara besar-besaran memenuhi hampir seluruh sudut kawasan di Korea Selatan. Rezim otoritarian mengumumkan sebuah konsesi yang cukup dramatik dan tidak diprediksi sebelumnya guna memenuhi tuntutan kelompok-kelompok *civil society* dan partai oposisi. Pemerintah juga mengadopsi tuntutan kelompok *civil society* untuk diadakan sistem pemilihan presiden secara langsung. Sebagaimana kasus di Taiwan dan Filipina, kelompok-kelompok *civil society* yang berbeda-beda di Korea Selatan telah memainkan peran krusial dalam mendobrak rezim otoritarian

dan menyibak lahirnya sebuah era transisi menuju demokrasi (Kim, 2004: 147).

Penutup

Civil society dipandang penting bagi proses perubahan sosial-politik demokratis, namun keberadaannya harus disesuaikan dengan konteks sosial, budaya dan perpolitikan di Asia.

Civil society di Asia memiliki karakteristik yang beragam, ada yang moderat, liberal, bahkan sampai radikal. Kelompok-kelompok *civil society* dengan beragam kecenderungan ideologi-politiknya itu saat bersinggungan dengan negara dan juga pasar, menunjukkan karakter yang dinamis dan sekaligus fluktuatif, terkadang sangat kritis, menjaga jarak dan bahkan berhadap-hadapan dengan negara, tetapi kerap pula bermesraan dan bergandengan tangan dengan Negara.

Perkembangan dan pertumbuhan *civil society* di Asia membawa dua konsekuensi sekaligus, membawa berkah dan sekaligus membawa musibah bagi demokrasi. *civil society* di Asia dapat memainkan peran penting dalam mendorong perubahan politik yang demokratis sangat tergantung kondisi domestik (nasional) suatu negara tersebut dan sekaligus kondisi internasionalnya, ketika kedua faktor tersebut cukup kondusif, maka peran *civil society* dalam mendorong perubahan politik akan berhasil dengan baik.

Secara teoritis, gerakan-gerakan *civil society* di negara-negara Asia dipengaruhi dua pemikiran terkemuka yakni Gramscian dan Neo-Tocquevillean. Perspektif Gramscian tampak dominan pengaruhnya di negara-negara Korea Selatan, Taiwan dan Indonesia, terutama pada periode pra-demokrasi. Perspektif Gramscian juga memiliki pengaruh besar terhadap masa depan gerakan *civil society* di Sri Lanka, Burma dan Filipina. Sedangkan perspektif Neo-Toquevillean memiliki pengaruh kuat di negara-negara Jepang, India, Korea Selatan, Taiwan, Tailan, Indonesia, Singapura dan Malaysia.

Daftar Rujukan

- Alagappa, Muthiah. 2004. *Civil Society and Political Change in Asia: Expanding and Contracting Space Democratic*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Arato, Andrew. 2000. *Civil Society, Constitution, and Legitimacy*. Lahm, Md: Rowman & Littlefield.
- Budiman, Arif. 1990. *State and Civil Society in Indonesia*. Australia: Center of Southeast Asian Studies.
- Cohen, Jean L. and Andrew Arato. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gramsci, Antonio. 1971. *The Selections From the Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.
- Hall, John A. 1995. In Search of Civil Society, dalam Johan A. Hall (ed.) *Civil Society: Theory, History, Comparasion*. Cambridge, Massachussets: Polity Press.
- Haynes, Jeff. 2000. *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggirkan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hikam, Muhammad A.S. 2000. *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Huntington, Samuel P. 1993. *Democacy's Third Wave*, dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner (ed.) *The Global Resurgence of Democracy*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.